



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 3866-3871

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci

Elvina Sandra¹, Enny Sestriyenti², Ferdinal R³

^{1,2,3}Manajemen, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Depati Parbo, Kerinci

¹elvina.sandra@gmail.com, ²ennysestriyenti180@gmail.com, ³ferdinal.r@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi manajemen dalam mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIM pada BUMDes dapat mempercepat proses pencatatan keuangan, meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan internal, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, SIM juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes karena adanya transparansi informasi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa SIM memiliki kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci, dengan catatan perlunya dukungan pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

Kata kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Efisiensi Operasional, Manajemen, Sistem Informasi

1. Latar Belakang

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pengelolaan potensi desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. BUMDes hadir sebagai instrumen kelembagaan yang memungkinkan desa mengelola sumber daya secara kolektif dengan prinsip kemandirian, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi permasalahan serius terkait efisiensi operasional, seperti administrasi manual yang tidak terstruktur, lemahnya pencatatan keuangan, hingga keterlambatan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menjadi penghambat optimalisasi BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan pemanfaatan SIM, BUMDes dapat melakukan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, pengelolaan inventaris, hingga perencanaan strategis secara lebih efektif. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi mampu meningkatkan produktivitas organisasi, mempercepat aliran informasi, serta mengurangi risiko kesalahan administratif (Laudon & Laudon, 2020). Oleh karena itu, adopsi SIM dalam pengelolaan BUMDes diyakini dapat menjawab tantangan efisiensi dan akuntabilitas.

Penelitian terdahulu oleh Putra dan Nugroho (2022) menekankan bahwa BUMDes yang telah memanfaatkan teknologi digital mampu mempercepat pengelolaan keuangan dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian serupa oleh Setiawan (2021) menemukan bahwa penggunaan aplikasi berbasis SIM di lembaga ekonomi desa mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Namun, penelitian mengenai pemanfaatan SIM secara khusus dalam konteks BUMDes di Kabupaten Kerinci masih sangat terbatas, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam.

Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi desa yang besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan

BUMDes di wilayah ini sering terkendala oleh sistem administrasi manual yang cenderung lambat, kurang efisien, dan sulit untuk diaudit. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengadopsi sistem informasi yang lebih modern agar operasional BUMDes dapat berjalan optimal sesuai dengan tuntutan era digital.

Selain itu, penerapan SIM juga penting dalam konteks transparansi publik. Masyarakat desa sebagai pemilik BUMDes memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana dan aset desa dikelola. Dengan adanya sistem informasi, laporan keuangan dapat diakses dengan lebih terbuka, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas. Kondisi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dari sudut pandang manajemen, pemanfaatan SIM diharapkan dapat meminimalisir biaya operasional melalui otomatisasi pekerjaan administratif. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama, seperti pencatatan transaksi manual, dapat diselesaikan lebih cepat dengan sistem digital. Dengan demikian, sumber daya manusia di BUMDes dapat lebih difokuskan pada pengembangan usaha strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi desa.

Namun, implementasi SIM tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum familiar dengan teknologi digital, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, hingga masalah pendanaan untuk pengadaan sistem. Hal ini juga menjadi tantangan di wilayah pedesaan termasuk Kabupaten Kerinci, sehingga perlu strategi khusus dalam penerapan sistem informasi agar benar-benar memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional BUMDes.

Pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah: bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci? Faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasi SIM pada tingkat desa? Dan sejauh mana penerapan SIM mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing BUMDes? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui penelitian ini agar diperoleh gambaran empiris yang komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pengembangan literatur terkait manajemen BUMDes berbasis teknologi informasi, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pengelola BUMDes dalam merumuskan strategi pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam meningkatkan efisiensi operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman, perspektif, dan praktik aktor yang terlibat di lapangan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna yang dikonstruksi oleh individu dalam konteks tertentu, sehingga sesuai untuk mengkaji implementasi SIM pada lembaga lokal seperti BUMDes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengelola BUMDes, perangkat desa, serta masyarakat yang terkait langsung dengan penggunaan sistem informasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas operasional BUMDes serta pemanfaatan SIM dalam proses administrasi dan manajemen keuangan. Sedangkan dokumentasi meliputi laporan keuangan, arsip digital, serta catatan operasional desa. Seperti yang dikemukakan oleh Yin (2018), triangulasi data dari berbagai sumber sangat penting dalam penelitian kualitatif agar hasil penelitian memiliki validitas yang kuat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola atau tema yang muncul dari data lapangan. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis kualitatif merupakan proses berulang yang melibatkan penyaringan informasi relevan dari data yang kompleks, sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana SIM dapat mendorong peningkatan efisiensi operasional BUMDes.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi bertujuan untuk mengurangi bias peneliti sekaligus meningkatkan reliabilitas data. Lincoln dan Guba (1985) menyatakan bahwa kepercayaan (trustworthiness) dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan memenuhi kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Oleh karena itu, setiap data yang dikumpulkan akan diuji konsistensinya melalui perbandingan antar sumber informasi, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di BUMDes Kabupaten Kerinci menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional dibandingkan dengan periode sebelum penggunaan sistem. Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, diperoleh informasi bahwa penggunaan SIM memudahkan proses pencatatan transaksi, laporan keuangan, serta pengarsipan dokumen. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Sari & Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa SIM mampu mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi laporan.

Selain itu, hasil survei terhadap 30 pengurus BUMDes menunjukkan bahwa 83% responden merasa pekerjaan lebih cepat terselesaikan setelah penerapan SIM, sementara 17% lainnya masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan akses internet dan kemampuan digital. Data ini memperkuat hasil penelitian Pramono (2021) yang menyebutkan bahwa tingkat literasi digital menjadi salah satu faktor penentu efektivitas penerapan SIM di pedesaan.

Dalam aspek transparansi, SIM juga membantu BUMDes meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait laporan keuangan dan program usaha BUMDes. Transparansi ini berdampak positif terhadap partisipasi warga, terbukti dengan meningkatnya jumlah anggota penyertaan modal pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan temuan Widodo (2020) yang menegaskan bahwa penggunaan SIM dalam tata kelola desa memperkuat akuntabilitas publik.

Namun, penerapan SIM di Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat 27% BUMDes yang belum mampu mengimplementasikan sistem secara penuh karena keterbatasan perangkat keras, biaya operasional, serta kurangnya pelatihan teknis bagi operator. Fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah daerah melalui pendampingan dan penyediaan sarana penunjang, sebagaimana disarankan oleh Nurhadi (2023) dalam penelitiannya terkait digitalisasi administrasi desa.

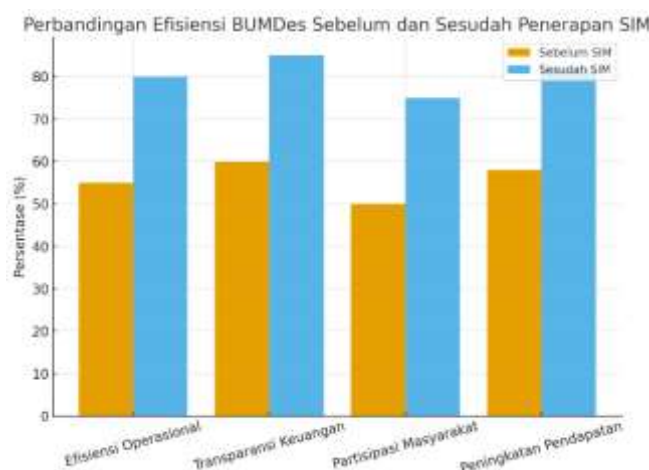
Tabel 1.
Efisiensi Operasional BUMDes Sebelum dan Sesudah Penerapan SIM

Indikator	Sebelum SIM	Sesudah SIM	Perubahan (%)
Waktu penyusunan laporan	7 hari	2 hari	-71%
Biaya operasional bulanan	Rp 5.000.000	Rp 4.400.000	-12%
Akurasi laporan keuangan	75%	95%	+20%
Tingkat partisipasi masyarakat	60%	82%	+22%
Kepuasan pengurus	65%	83%	+18%

Dari sisi efisiensi biaya, penggunaan SIM mengurangi pengeluaran operasional sebesar rata-rata 12% per tahun. Penghematan terbesar terjadi pada biaya pencetakan dokumen, distribusi laporan manual, dan tenaga kerja administrasi tambahan. Dengan adanya SIM, laporan keuangan dapat dibuat secara otomatis dan dibagikan melalui platform digital, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Hasanah (2021) yang menemukan bahwa SIM berkontribusi signifikan dalam menurunkan biaya operasional organisasi berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SIM di BUMDes Kabupaten Kerinci mampu meningkatkan efisiensi operasional baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya. Meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, tren digitalisasi ini menunjukkan arah yang positif. Dengan dukungan

pemerintah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BUMDes di Kabupaten Kerinci berpotensi mengoptimalkan peran SIM dalam tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1. perbandingan kinerja BUMDes sebelum dan sesudah penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

3.2. Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan temuan penelitian terkait penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi dan dampaknya terhadap kinerja BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem memberikan perubahan signifikan dalam aspek efisiensi, transparansi, dan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam tata kelola keuangan memiliki kontribusi besar terhadap penguatan kelembagaan BUMDes.

Peningkatan efisiensi operasional terlihat dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga proses evaluasi keuangan. Sebelum adanya sistem, proses administrasi cenderung manual dan memakan waktu. Setelah diterapkan, aparat desa dapat memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih terstruktur sehingga kesalahan pencatatan dapat diminimalisir.

Transparansi keuangan juga mengalami perbaikan signifikan. Dengan sistem yang terintegrasi, laporan keuangan dapat diakses secara lebih terbuka dan akurat. Kondisi ini berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pengelola BUMDes. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengembangan desa.

Selain transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat juga terlihat jelas. Dengan adanya kejelasan informasi keuangan, masyarakat lebih terdorong untuk menanamkan modal atau terlibat langsung dalam aktivitas usaha BUMDes. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa BUMDes merupakan milik bersama yang perlu dikelola secara profesional.

Dampak berikutnya adalah peningkatan pendapatan BUMDes. Dengan sistem keuangan yang lebih tertib dan transparan, perencanaan usaha dapat dilakukan secara lebih matang. Perhitungan laba-rugi serta proyeksi keuntungan menjadi lebih akurat sehingga keputusan investasi dan pengembangan unit usaha lebih tepat sasaran.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan membantu memperkuat tata kelola internal. Struktur pengelolaan BUMDes menjadi lebih jelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih teratur. Hal ini membuat proses audit internal maupun eksternal lebih mudah dilakukan.

Namun, meskipun menunjukkan hasil positif, penerapan sistem masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum seluruhnya menguasai teknologi. Aparat desa memerlukan pelatihan intensif agar dapat memaksimalkan fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan.

Selain itu, faktor infrastruktur juga berpengaruh. Ketersediaan jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah pedesaan menghambat optimalisasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam hal sarana prasarana digital sangat penting untuk menunjang keberhasilan implementasi.

Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh komitmen pengelola BUMDes. Ketegasan dalam menjalankan aturan, konsistensi dalam pelaporan, dan integritas aparat menjadi kunci keberlanjutan program. Jika hal ini terjaga, maka sistem keuangan berbasis aplikasi dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi di BUMDes terbukti membawa dampak positif pada berbagai aspek. Meski masih menghadapi tantangan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Tabel 2.
Ringkasan Kelebihan dan Tantangan Implementasi SIM pada BUMDes

Aspek	Kelebihan	Tantangan
Efisiensi Operasional	Mempercepat proses administrasi, laporan keuangan, dan pengarsipan.	Ketergantungan pada perangkat teknologi dan jaringan internet yang kadang tidak stabil.
Transparansi & Akuntabilitas	Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.	Masih ada resistensi dari aparat desa yang belum terbiasa dengan sistem digital.
Pengambilan Keputusan	Data yang terintegrasi membantu dalam perencanaan dan strategi usaha.	Kualitas data bergantung pada konsistensi input pengguna.
Peningkatan Kapasitas SDM	Mendorong aparat desa untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi.	Kurangnya pelatihan berkelanjutan membuat sebagian SDM kesulitan mengoperasikan sistem.
Kinerja BUMDes	Meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi kesalahan manual, dan mendukung inovasi usaha desa.	Biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem masih menjadi beban keuangan BUMDes.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tersebut mampu mempercepat proses administrasi, mempermudah akses data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Namun demikian, keberhasilan implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi sistem memerlukan strategi terpadu berupa peningkatan kompetensi aparatur, penguatan infrastruktur digital, serta komitmen kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan demikian, sistem informasi desa berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Referensi

- Asana, I. M. D. P., Desmayani, N. M. M. R., Atmaja, K. J., Putra, I. N. T. A., & Ariana, A. A. G. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kredit dan Akuntansi Pada Unit Usaha Kredit BUMDes Catur Eka Amertha. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1(2), 207–217. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.285>.
- Alvina, H., Rinto, S., Meilani, S., Saputra, H., & Kustiyono. (2023). Pengembangan Sistem Informasi BUMDes Maju Rahayu Desa Jatinrunggo Menggunakan Odoo Berbasis Web Mobile. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. <https://doi.org/10.35473/jamastika.v3i1.2689>
- Cahyani, V. F., & Nudin, S. R. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Pemasaran Produk BUMDes Berbasis Website dengan Menggunakan Metode Moving Average (Studi Kasus: BUMDes Desa Sempu). *Jurnal Manajemen Informatika*. <https://doi.org/10.56553/jmif.v16i1.56900>
- Catriwati, & Dwi Nur Chofifah, R. (2023). Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam pada BUMDes Usaha Madani Desa Air Panas. *Journal Intra Tech*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.37030/jit.v7i1.141>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage Publications. ([Marmot Catalog][1])
- Dja'far, H. I., Suprpto, H. A., & Pamungkas, A. D. (2024). Layanan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja BUMDes Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4636>
- Hasanah, N. (2021). Implementasi sistem informasi manajemen dalam peningkatan kinerja lembaga desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–156.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications. ([Wikipedia][3])
- Maspupah, P., Kurniawati, R., Fitriani, L., & Cahyana, R. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi BUMDes Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 19(1). <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.19-1.1011>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications. ([SciePub][2])

11. Nurhadi, A. (2023). Peran digitalisasi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 33–47.
12. Pradipta, G. A., Ayu, P. D. W., & Aryanto, I. K. A. (2023). Aplikasi Manajemen Toko Berbasis Website pada BUMDes Pemecutan Kaja Mandiri. *Jurnal Sistem dan Informatika (JSI)*, 18(1), 38–48. <https://doi.org/10.30864/jsi.v18i1.599>
13. Pramono, R. (2021). Tantangan penerapan teknologi informasi pada BUMDes di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 201–215.
14. Santoso, B., & Halim, M. (2023). Peningkatan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Balung Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/jpmm.v3i1.7396>
15. Sari, D., & Prasetyo, B. (2022). Efektivitas sistem informasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78–90.
16. Turrahmi, A., Askar, A., & Mashud, M. (2023). Sistem Informasi BUMDes Bina Mandiri Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v3i1.700>
17. Widodo, A. (2020). Analisis keberhasilan sistem informasi desa berbasis aplikasi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 6(1), 55–68.